

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publk*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA. Diambil kembali dari <https://eprints.untirta.ac.id/23453/1/Dasar-dasar%20Kebijakan%20Publik%20Edisi%20Revisi%20%28Alfabet%2C%202016%29.PDF>
- Anshori, M., & Iswati, S. (2009). *Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen*. Jurnal Ilmiah Kependidikan.
- Ashari, M. L., & Hariani, D. (2019). ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU TANI DI KECAMATAN BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA. *Journal of Public Policy and Management Review*. doi:10.14710/jppmr.v8i2.23711
- BARITO POST.co.id. (2020, September 8). *Pertani Pastikan Pandemi Covid-19, Tak Ganggu Distribusi Pupuk*. Diambil kembali dari <https://www.baritopost.co.id/pertani-pastikan-pandemi-covid-19-tak-ganggu-distribusi-pupuk/>
- Basuki, N. M. (2019). PERSEPSI PETANI (Pengguna kartu tani)TERHADAP KEBIJAKAN PROGRAM KARTU TANI DI KECAMATAN BATANG BATANG SUMENEP. *ejouenalwiraraja*.
- bekasikab.go.id. (2022, September 22). *Dewan Syahrir Dorong Kabupaten Bekasi Jadi Lumbung Padi Jabar*. Diambil kembali dari <https://bekasikab.go.id/dewan-syahrir-dorong-kabupaten-bekasi-jadi-lumbung-padi-jabar>
- bekasikab.go.id. (2024, Agustus 6). *Atasi Kekeringan Lahan Pertanian di Sukatani, Pemkab Bekasi Siapkan Anggaran BTT*. Diambil kembali dari <https://www.bekasikab.go.id/atasi-kekeringan-lahan-pertanian-di-sukatani-pemkab-bekasi-siapkan-anggaran-btt>
- BPK RI. (2020, Januari 2). *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020*. Retrieved from Bab II Pasal 3 ayat (3) : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161287/permentan-no-01-tahun-2020>
- Budiardjo, M. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Chakim, L., Rifin, A., & Sanim, B. (2019). Pengaruh Implementasi Kartu Tani terhadap Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. *Jurnal Pangan*. doi:<https://doi.org/10.33964/jp.v28i3.444>
- DATABASE PERATURAN. (2020). PERMENTAN NOMOR 01 TAHUN 2020. *Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020*. Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161287/permentan-no-01-tahun-2020>
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. (2020, Januari 27). *RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI DENGAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN, DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN, KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN, SERTA KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMEMUKAAN*. Diambil kembali dari <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K4-23-35817e9ed4a85477f366d41682687556.pdf>
- DISTANKAN. (2020, November 11). *Fungsi E-RDCK Dan Syarat Mendapatkan Kartu Tani Untuk Pupuk*. Diambil kembali dari <https://distankan.kotamobagu.go.id/artikel/detail/171/21/fungsi-e-rdck-dan-syarat-mendapatkan-kartu-tani-untuk-pupuk#:~:text=%E2%80%9CVerifikasi%20data%20Rencana%20Definitif%20Kebutuhan,usulan%20melalui%20sistem%20e%2DRDCK>.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: "Widya Karya" Semarang.
- Ilmu Petani Berdasi. (2017, Agustus 22). Apa Itu Ilmu Pertanian?? Diambil kembali dari <https://ilmu-petani-berdasi.blogspot.com/2017/08/>
- KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA. (2022). *KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN*. Diambil kembali dari PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2023: <https://psp.pertanian.go.id/storage/1429/Petunjuk-Teknis-Pengelolaan-Pupuk-Bersubsidi-TA-2023.pdf>
- Kompas.com. (2022, Agustus 21). *Akademisi Sebut Permentan Nomor 10 Tahun 2022 Dapat Tingkatkan Tata Kelola Pupuk Subsidi*. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2022/08/21/201725826/akademisi-sebut-permentan-nomor-10-tahun-2022-dapat-tingkatkan-tata-kelola>
- Kurniawati, E., & Kurniawan, A. (t.thn.). Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Kartu Tani di Kabupaten Pati. *Jurnal Bumi Indonesia*, 2018. Diambil kembali dari <https://www.neliti.com/id/publications/272542/persepsi-masyarakat-terhadap-penggunaan-kartu-tani-di-kabupaten-pati-kasus-di-de>

- Lestari, O., & Wijayanto, H. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani (Studi Kasus Pada Petani Nanas di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalinga Jawa Tengah). *Journal of Political Issues*. Diambil kembali dari <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/article/view/68>
- Mufidah, N., & Prabawati, I. (2018). Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Journal Publika*. doi:<https://doi.org/10.26740/publika.v6n9.p%25p>
- Nurhasan, Suhaerudin, Santoso, B., & Bastaman, K. (2022). Analisis Kebijakan Pemberlakuan Kartu Tani Di Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang: Analisis Kebijakan Pemberlakuan Kartu Tani Di Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. *JURNAL STUDI ADMINISTRASI PUBLIK*. Diambil kembali dari <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/PASCA/article/download/1267/1023>
- Permana, D. P. (2017). Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2018.
- Purba, D. W., Thohiron, M., Surjaningsih, D. R., Sagala, D., Gandasari, D., Ramdhini, R. N., . . . Manullang, S. O. (2020). *Pengantar ILMU PERTANIAN*. Yayasan Kita Menulis. Diambil kembali dari https://polbangtan-bogor.ac.id/responsive_filemanager/source/artikel%20bu%20dyah/Buku%203%20-%20Pengantar%20Ilmu%20Pertanian_removed.pdf
- Rosyid, H. A., Nuraeni, L., Trihadi, M. N., Khotimah, W., Huda, W., & Wahidah, I. (2021). Analisis Efektivitas Kartu Tani Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani di Lingkungan Cilipung. *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*. Diambil kembali dari <http://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/553/489>
- Subarsono, A. (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudjono, S. (2011). SISTEM DISTRIBUSI BERBASIS RELATIONSHIP: KAJIAN. *Media Neliti*, 315-316. Diambil kembali dari <https://media.neliti.com/media/publications/56908-ID-sistem-distribusi-berbasis-relationship.pdf>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.

- Sutmasa, Y. G. (2021). MEMASTIKAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK. *JURNAL CAKRAWARTI*. Diambil kembali dari <http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/cakrawarti/article/view/242>
- Wahid, A. A., Gayatri, S., & Prayoga, K. (2021). Problematika Impelementasi Program Kartu Tani di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. Diambil kembali dari <https://jepa.ub.ac.id/index.php/jepa/article/view/681>
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service). Diambil kembali dari <https://books.google.co.id/books?id=QDvJEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Yuliana, A., & Nadapdap, H. J. (2020). FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN ADOPSI PETANI TERHADAP KARTU TANI DI EKS-KARESIDENAN SURAKARTA. *Jurnal Pertanian Agros*. Diambil kembali dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1751921&val=12307&title=FAKTOR%20YANG%20MEMENGARUHI%20KEPUTUSAN%20ADOPSI%20PETANI%20TERHADAP%20KARTU%20TANI%20DI%20EKS-KARESIDENAN%20SURAKARTA>
- Zainuddin, A., & Wibowo, R. (2021). Dampak Kebijakan Kartu Tani terhadap Produksi dan Efisiensi. *JURNAL PANGAN*. Diambil kembali dari <https://www.jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/view/540>

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANI UNTUK DISTRIBUSI
PUPUK SUBSIDI DI KECAMATAN TAMBUN UTARA KABUPATEN
BEKASI

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

No	Indikator	Pertanyaan
1	Aspek Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana metode komunikasi yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi terkait kebijakan Kartu Tani?
2	Aspek Sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah SDM sudah cukup memahami dalam kebijakan Kartu Tani Tahun, lalu bagaimana Pelaksanaanya?
		<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kebijakan Kartu Tani di Kabupaten Bekasi?
3	Aspek Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada komitmen yang kuat dalam pelaksanaan Kartu Tani untuk distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Bekasi?
		<ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada rapat koordinasi Unit Pelaksana Lapangan, baik ditingkat

		Kecamatan, Kelurahan atau dengan pengelola Pusat Perbelanjaan, para Tani?
4	Aspek Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada unit pelaksana lapangan sebagai Implementasi Kebijakan Kartu Tani untuk distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Bekasi?
		<ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau mekanisme pelaksanaan implementasi kebijakan kartu tani di Kabupaten Bekasi?
5	Hambatan	<ul style="list-style-type: none"> • Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kartu tani untuk distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Bekasi?
6	Upaya	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses implementasi kebijakan kartu tani di Kabupaten Bekasi?

**Lampiran 2 Transkrip Wawancara Kelompok Jabatan Fungsional
Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi**

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama	Bpk. Artif Risman
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Jabatan	Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
Tanggal	6 Februari 2025

A. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk Subsidi di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?

1) Aspek Komunikasi

a. Bagaimana metode komunikasi yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi terkait kebijakan Kartu Tani?

Jawab : “Oh, jadi apalah komunikasi. Kalau ini kan kartu tani itu programnya, jadi kita ikutin programnya. Programnya dari mana? Kalau karutan itu, programnya dari atas. Berati top down, berati peran komunikasi juga. Kami di dinaas menyampaikan informasi yang didapat dari atas, baik dari kementerian maupun dari provinsi, untuk disampaikan ke ABP-PBP sesuai dengan arahan dan aturan yang ada dalam pengelolaan kartu tani”.

2) Aspek Sumberdaya

a. Apakah SDM sudah cukup memahami dalam kebijakan Kartu Tani, lalu bagaimana Pelaksanaanya?

Jawab : “Kalau implementasi, implementasi itu, yang implementasi kartu tani itu gabara (gabungan bank negara) dan kios. Jadi usernya itu gabara. Terus apa namanya yang melakukan aktifasinya itu di kios-kios mengajar resmi. Kalau

kami hanya pendataan di kartu tani”. “Kalau dalam pendataan tidak ada masalah yang krusial, memang data tinggi kita cari ke petani. Cuma, permasalahan yang paling mendasari itu ke percayaan petani, kepada kedua kelompok untuk menyampaikan KTP-nya. Karena jaman sekarang, banyak KTP-KTP yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak, atau merugikan petani, sehingga mereka sangat hati-hati dalam menyampaikan KTP-nya. Kalau permasalahan, paling permasalahan ada di input, kenapa? Ini berkaitan dengan sistem *maintenance* dan banyaknya apa? Data masuk dalam satu sistemnya.”.

- b. Bagaimana ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kebijakan Kartu Tani di Kabupaten Bekasi?

Jawab : “Kalau anggaran kami tidak tahu. Kamu tidak tahu. Kalau kami dibawah, kami tidak tau anggaran”.

3) Aspek Disposisi

- a. Apakah ada komitmen yang kuat dalam pelaksanaan Kartu Tani untuk distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Bekasi?

Jawab : “Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi berkomitmen kuat untuk mendata RDKK yang akan digunakan. Salah satunya untuk pembuatan kartu tani. Komitmen ini ditunjukkan dengan pengambilan dan penggunaan data Sebagai dengan aturan tepat waktu tepat sasaran”.

- b. Apakah ada rapat koordinasi Unit Pelaksana Lapangan, baik ditingkat Kecamatan, Kelurahan atau dengan pengelola Pusat Perbelanjaan, para Tani?

Jawab : “Koordinasi dalam pertanian => KP BPP => PPL => kelompok tani => petani”.

4) Aspek Struktur Organisasi

- a. Apakah ada unit pelaksana lapangan sebagai Implementasi Kebijakan Kartu Tani untuk distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Bekasi?

Jawab : “Timnya ada 2 bidang, yakni bidang penyuluhan (kelembagaan) dan bidang PSP (pupuk per subsidi)

- b. Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau mekanisme pelaksanaan implementasi kebijakan kartu tani di Kabupaten Bekasi?

Jawab : “Untuk SOP terdiri dari tiga (3) yakni informasi, media dan alur input. Untuk informasi diawali dengan sosialisasi BPP”

“Medianya, Rapat dinas setelah dari rapat dinas diadakan pertemuan dengan gakpotan atau rapat minggon di kecamatan dan atau desa”

“Alur input, petani menyerah KTP kepada Gapoktan penyuluh pertanian memgkolektifkan datanya di gakpotan setelah itu masuk ke admin r dkk kecamatan dilanjutkan kepada koordinator penyuluh diterus kepada kepala kasi yang menangani pupuk diterus kepada kepala bidang setelahnya diteruskan kepada kepala dinas untuk setelahnya menjadi SK bupati dan dibuatkan perbub yang selanjutnya masuk ke kementrian pertanian. Data yang masuk dikelola menjadi 2 yaitu: 1. Data pesanan pupuk, 2. Data petani yang masuk ke gabara yang mempunyai otoritas mencetak kartu tani”

- B. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kartu tani untuk distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Bekasi?

Jawab : “ Pertama, terjadi anomali di gabara (gabungan bank negara) yang kerap salah mencetak kartu tani jumlah kartu yang dicetak tidak sesuai dengan data yang sudah di input. Kedua, masalah sistem r dkk yang sering error dan masalah internet. Ketiga, anomali terjadi pada para petaniny sendiri yang kurang memahami kegunaan fungsi kartu tani”

- C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses implementasi kebijakan kartu tani di Kabupaten Bekasi?

Jawab : “Mensosialisasikan kepada petani dan kios lewat berbagai media komunikasi maupun turun langsung ke setiap balai penyuluhan pertanian kecamatan”.

Lampiran 3 Transkrip Wawancara Ketua BPP Kec. Tambun Utara

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama	Ibu Sulistyawati
Jenis Kelamin	Perempuan
Jabatan	Ketua BPP Kecamatan Tambun Utara
Tanggal	28 September 2024

A. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk Subsidi di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?

1) Aspek Komunikasi

a. Bagaimana peran Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dalam memberikan sosialisasi terkait komunikasi kebijakan Kartu Tani?

Jawab : “Untuk informasi dari pusat masalah kartu tani itu bisa tersampaikan dengan baik. Kita itu ada zoom, ada raker mas.. jadi setiap info itu selalu nyampe ke kami seperti itu. Nanti setelah dari kita, nanti akan ada perkumpulan nih.. ada pertemuan untuk menyapaikan info itu. Kita adakan pertemuan setiap satu desa satu pertemuan. Pertemuannya ada tingkat KTA maupun setiap kelompok nanti informasi kita lanjutkan kepada petani dalam pertemuan tersebut ada 25 orang atau berapa. Dari kelompok kita kumpulkan dulu disini, KTA nanti dari itu kita kumpulkan lagi di desa. Dalam masalah komunikasi itu

seringnya bapak-bapak sering enggak nyambung.. sering munta diulang kalau dijelasin sama rata-rata sudah sepuh sih mas”

2) Aspek Sumberdaya

- a. Bagaimana SDM di BPP Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi sudah cukup memahami dalam kebijakan Kartu Tani, lalu bagaimana Pelaksanaanya?

Jawab : “Kalau koordinasi mah satu saya saja, penyuluh 2 orang sama penjaga 1 orang. Kalau saya senditi megang wilayah 2 desa srimukti sama jejalen. Lalu ada Pak Widi Santoso, dia megang 3 wilayah.. ada Srimahi, Sriamur, sama Satria Jaya. Kalau SDM ada 5 orang. Setiap pertemuan diadakan sebulan sekali. Kalau ada urgen sesuai request petani”

- b. Bagaimana terkait anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan kebijakan Kartu Tani di Kecamatan Tambun Utara?

Jawab : “Kalau anggaran mah kita enggak ada”

3) Aspek Disposisi

- a. Apakah ada komitmen yang kuat dari Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan Kartu Tani untuk distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tambun Utara?

Jawab : “Kita adalah perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupayen Bekasi untuk di wilayah Kecamatan Tambun Utara”

- b. Apakah ada rapat koordinasi Unit Pelaksana Lapangan, baik ditingkat Kecamatan, Kelurahan atau dengan pengelola Pusat Perbelanjaan, para Tani?

Jawab : “Ada, biasanya sebulan sekali.. tapi kalau ada sesuai yang urgent bisa langsung dirapatkan”

4) Aspek Struktur Organisasi

- a. Apakah ada unit pelaksana lapangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi sebagai Implementasi Kebijakan Kartu Tani untuk distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?

Jawab : “Kalau untuk koordinator mah ada ya mas”

- b. Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau mekanisme pelaksanaan implementasi kebijakan kartu tani di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?

Jawab : “Ya, standarnya paling sesuai dengan intruksi Dinasnya aja.. kita ikut gimana dari Dinas”

- B. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan kartu tani untuk distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?

Jawab : “Kalau untuk hambatan ya paling dalam komunikasinya masih agak sulit ke para petaninya, dan untuk kartu tani belum begitu efektif. Karena mesin ACDnya rusak tidak bisa di pergunakan. tap poober solusi datanya ada disitu aplikasinya ada di kios itu dari nik data beberapa mas.. jadi solusinya masih melakukan manual. Petani sering lupa dengan pinnya..”

- C. Upaya apa yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses implementasi kebijakan kartu tani di Kabupaten Bekasi?

Jawab : “Terus berusaha memberikan informasi dan minta koordinasi dari kita paling sih mas”

Lampiran 4 Transkrip Wawancara Ketua Tani Kec. Tambun Utara

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama	Bpk. Saipul Bahri
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Jabatan	Ketua Tani Kecamatan Tambun Utara
Tanggal	7 Oktober 2024

A. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk Subsidi di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?

1) Aspek Komunikasi

a. Bagaimana peran Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dalam memberikan sosialisasi terkait komunikasi kebijakan Kartu Tani?

Jawab : “kalo komunikasi sih lancar, tapi kalo buat keluhan kelompok tani lapornya ke BPP biar enak.. pasti turun kaya pengendalian hama karena ada PPS setiap desa. Suka terjadi missskomunikasi sama petani, karena petani apa-apa berdasarkan dengan yang dilapangan.. kalau BPP kaya teorinya jadi suka benturan. Teori dan prakteknya kan suka beda. Kalau kartu tani tahun 2018 sampai sekarang belum ada, tapi tahun 2018 kesana ada. Ya sebernernya Kartu Tani hanya untuk mempersulit petani, bukan untuk mempermudah petani. Bentuk fisiknya ada tapi sudah tidak kepake”

2) Aspek Sumberdaya

a. Apakah SDM BPP Kecamatan Tambun Utara sudah cukup memahami dalam kebijakan Kartu Tani, lalu bagaimana Pelaksanaanya?

Jawab : “oh kalo itu sih udah ya, tapi ya itu balik lagi ke para taninya yang belum paham”

- b. Bagaimana terkait anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan kebijakan Kartu Tani di Kecamatan Tambun Utara?

Jawab : “Ya itu paling patungan buat mulangin ongkos penarikan, kan jauh itu dari BPP ke Srimahi. Tidak turun dari Dinas, kita biaya sendiri mobil”

3) Aspek Disposisi

- a. Apakah ada komitmen yang kuat dari Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan Kartu Tani untuk distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Bekasi?

Jawab : “Ya kalau dia sih sebenarnya sungguh-sungguh, Cuma petaninya ini sulit enggak masuk gitu.. kan beda SDM tani kurang juga”

- b. Apakah ada rapat koordinasi Unit Pelaksana Lapangan, baik ditingkat Kecamatan, Kelurahan atau dengan pengelola Pusat Perbelanjaan, para Tani?

Jawab : “Ya... ada juga rapat petani-petaninya, jadi kebanyakan orang-orang BPPnya turuh ke bawah.. ke kelompok-kelompok tani. Cuma kebanyakan petani itu sekarang kartu tani enggak digunain, dia pengen transaksi cash ke toko-toko. Nah solusinya kemarin mah, jadi kalo beli itu sesuai yang ada di RTKK pengambilan pupuk. Sesuai jumlah dengan data yang ada..”

4) Aspek Struktur Organisasi

- a. Apakah ada unit pelaksana lapangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi sebagai Implementasi Kebijakan Kartu Tani untuk distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?

Jawab : “Kalo dari BPP ada PPL sama PPS, sama OTP pengendalian hama 4 orang”

b. Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau mekanisme pelaksanaan implementasi kebijakan kartu tani di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?

Jawab : “Ya alhamdulillah lumayan baik dia, sama penyampaianya lumayan baik”

B. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan kartu tani untuk distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?

Jawab : “kalau di yang kita rasain paling kekeringan, paling juga ada hama tikus, ya kalau itu sih alam juga.. enggak bisa kita kendaliin juga. Kalau untuk hama alhamdulillah dia tangkep. Kalau kartu tani kebanyakan para petani pada enggak ngerti, caranya gimana, cara pemakaiannya gimana, nah buat belanja ke kios juga ribet..”

C. Upaya apa yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses implementasi kebijakan kartu tani di Kabupaten Bekasi?

Jawab : “udah sering dari BPP nyampein, Cuma petaninya tetep kurang ngerti.. kaya berbelit-belit ribet gitu. Jadi sebenarnya kartu tani itu sejenis ATM gitu, yang kita masukin dana kesitu dibuat kita belanja. Tapi petani kita enggak mau pusing, maunya langsung cash.. maunya manual

Lampiran 5 Transkrip Wawancara Petani

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama	Bpk. Darman
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Jabatan	Petani
Tanggal	7 Oktober 2024

A. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk Subsidi di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?

1) Aspek Komunikasi

- a. Bagaimana peran Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dalam memberikan sosialisasi terkait komunikasi kebijakan Kartu Tani?

Jawab : “Kalo itu saya kurang paham ada atau enggaknya komunikasi dari dinas, biasanya kita disini dapat info dari BPP aja”

2) Aspek Sumberdaya

- a. Apakah SDM BPP Kecamatan Tambun Utara sudah cukup memahami dalam kebijakan Kartu Tani, lalu bagaimana Pelaksanaanya?

Jawab : “Kurang tau ya.. kita informasi enggak dari dinas. Dan biasanya ketemu sama orang BPP bukan orang-orang dinas”

- b. Bagaimana terkait anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan kebijakan Kartu Tani di Kecamatan Tambun Utara?

Jawab : “Kalo soal itu masih belum merata sih mas.. karena masih ada yang belum dapat kartu tani. Dan kebanyakan pada bingung cara pakenya gimana kalau pake kartu itu”

3) Aspek Disposisi

- a. Apakah ada komitmen yang kuat dari Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan Kartu Tani untuk distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Bekasi?

Jawab : “Kalo dari orang BPP sih bilangya ada, katanya mau berusaha untuk para petani di kabupaten Bekasi ini mas..”

- b. Apakah ada rapat koordinasi Unit Pelaksana Lapangan, baik ditingkat Kecamatan, Kelurahan atau dengan pengelola Pusat Perbelanjaan, para Tani?

Jawab : “Ada, tapi dari BPP bersama para petani aja”

4) Aspek Struktur Organisasi

- a. Apakah ada unit pelaksana lapangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi sebagai Implementasi Kebijakan Kartu Tani untuk distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?

Jawab : “Kurang tau kalo di dinas, kalo di BPP sih ada ya.. bagian-bagiannya gitu”

- b. Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau mekanisme pelaksanaan implementasi kebijakan kartu tani di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?

Jawab : “Saya sendiri masih kurang paham cara dapat kartu itu gimana, standarnya gimana, persyaratannya apa aja gitu mas”

- B. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan kartu tani untuk distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?

Jawab : “Informasinya masih kurang dari dinas ke BPPnya”

- C. Upaya apa yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses implementasi kebijakan kartu tani di Kabupaten Bekasi?

Jawab : “Ya paling, sedang diusahakan untuk memenuhi kebutuhan para petani sih ya...”

Lampiran 6 Transkrip Wawancara Petani

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama	Bpk. Tarmat
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Jabatan	Petani
Tanggal	7 Oktober 2024

A. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk Subsidi di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?

1) Aspek Komunikasi

a. Bagaimana peran Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dalam memberikan sosialisasi terkait komunikasi kebijakan Kartu Tani?

Jawab : “Enggak ada, jarang komunikasi.. sosialisasi juga belum ada”

2) Aspek Sumberdaya

a. Apakah SDM BPP Kecamatan Tambun Utara sudah cukup memahami dalam kebijakan Kartu Tani, lalu bagaimana Pelaksanaanya?

Jawab : “Lumayan paham sih kayanya mereka-mereka orang mah mas..”

b. Bagaimana terkait anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan kebijakan Kartu Tani di Kecamatan Tambun Utara?

Jawab : “Kalo soal anggaran enggak ada, kita pake kartu tapi belum semuanya juga sih”

3) Aspek Disposisi

- a. Apakah ada komitmen yang kuat dari Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan Kartu Tani untuk distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Bekasi?

Jawab : “Kata orang BPP sih ada mas, Cuma ya belum keliatan aja kalo sekarang-sekarang ini”

- b. Apakah ada rapat koordinasi Unit Pelaksana Lapangan, baik ditingkat Kecamatan, Kelurahan atau dengan pengelola Pusat Perbelanjaan, para Tani?

Jawab : “Ada kalo dari orang-orang BPP”

4) Aspek Struktur Organisasi

- a. Apakah ada unit pelaksana lapangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi sebagai Implementasi Kebijakan Kartu Tani untuk distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?

Jawab : “Biasanya kita dapat informasi dari pihak BPP sini aja sih mas.. mungkin orang BPP yang langsung komunikasi ke orang-orang dinas”

- b. Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau mekanisme pelaksanaan implementasi kebijakan kartu tani di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?

Jawab : “Kurang tau kalau soal itu ya... kita taunya informasi perihal bantuan kartu tani aja.. itu aja belum semuanya rata karena masih pada bingung”

- B. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan kartu tani untuk distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?

Jawab : “Informasinya kurang jelas aja sih mas.. masih terlalu bertele-tele”

- C. Upaya apa yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses implementasi kebijakan kartu tani di Kabupaten Bekasi?

Jawab : “Kalo itu gimana orang-orang BPPnya aja yang suka komunikasi sama orang dinas mas”

DOKUMENTASI



Dokumentasi 1. Peneliti Bersama Ibu Sulistyawati (Ketua BPP Kecamatan Tambun Utara)



Dokumentasi 2. Peneliti Bersama Bpk. Darman (Petani)



Dokumentasi 3. Peneliti Bersama Bpk. Saipul Bahri (Ketua Petani Kelompok Tani Desa Srimahi)



Dokumentasi 4. Peneliti bersama Bpk. Artif Risman (Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian)

 Revisi_Proposal_Soon_BAB_4_-_Copy.docx

ORIGINALITY REPORT

10 %	10 %	2 %	4 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	1 %
2	jepa.ub.ac.id Internet Source	1 %
3	core.ac.uk Internet Source	1 %
4	nanopdf.com Internet Source	1 %
5	www.pertanian.go.id Internet Source	1 %
6	www.jurnalpangan.com Internet Source	1 %
7	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
8	positori.unsil.ac.id Internet Source	<1 %
9	psp.pertanian.go.id Internet Source	<1 %
10	Submitted to UIN Jambi Student Paper	<1 %
11	journal.appihi.or.id Internet Source	<1 %
